

SKRIPSI

kk
AN 19 / 02
Har
k

Veby Eleanor Harianto

**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) BAGI
PEKERJA PENYANDANG CACAT FISIK DI GEDUNG
PERKANTORAN BERTINGKAT.**



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
BAGI PEKERJA PENYANDANG CACAT FISIK
DI GEDUNG PERKANTORAN BERTINGKAT**

M I L I K
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130 355 366



Veby Eleanor Harianto
NIM. 039814729

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan seputar pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, diambil beberapa kesimpulan, antara lain :

1. Secara umum perlindungan hukum dari aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja di gedung perkantoran bertingkat sudah ada dan cukup memadai, namun belum mencakup hal-hal yang lebih spesifik seperti pengaturan secara tegas mengenai Sindroma Pencakar Langit (*Sick Building Syndrome*) serta cara-cara untuk mengatasinya. Lalu pemerintah juga belum memberikan pengaturan secara spesifik mengenai pengevakuasian pekerja dalam situasi-situasi darurat seperti kebakaran dan gempa bumi. Ada pengaturan mengenai penanggulangan kebakaran di tempat kerja namun pengaturan untuk situasi darurat lainnya seperti gempa bumi belum ada.
2. Belum adanya pengaturan secara spesifik oleh pemerintah mengenai proses pengevakuasian para pekerja penyandang cacat fisik dalam situasi-situasi darurat seperti kebakaran dan gempa bumi sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dari pemerintah terhadap pekerja penyandang cacat fisik masih lemah

karena pengaturannya masih mencakup hal-hal yang umum saja, belum secara detail.

2. Saran

Berdasarkan berbagai kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah hendaknya membuat pengaturan-pengaturan yang spesifik mengenai Sindroma Pencakar Langit (*Sick Building Syndrome*) dan cara-cara untuk mengatasinya serta pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penanggulangan dan pengevakasian para pekerja saat terjadinya keadaan-keadaan darurat seperti kebakaran dan gempa bumi di gedung perkantoran bertingkat secara spesifik.
2. Pemerintah juga harus memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas bagi para pekerja penyandang cacat fisik dengan membuat pengaturan secara lebih spesifik pembuatan serta penyediaan berbagai macam fasilitas dengan desain khusus untuk membantu proses pengevakasian mereka di gedung perkantoran bertingkat pada masa kini dan mendatang.